

SINERGITAS KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENGENDALIKAN INFLASI DI INDONESIA

Maharajabdinul¹

Universitas Fajar Makassar, Indonesia¹

Email: maharajab.dinul@unifa.ac.id

Abdul Latif²

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo²

Email: abdullatif1003@gmail.com

Dania U. Wonggole³

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo³

Email: daniawonggole02@gmail.com

Siprianus Palete⁴

Universitas Fajar Makassar, Indonesia⁴

Email: sipripalete@gmail.com

Keywords:

Inflation, Fiscal Policy, Monetary Policy

ABSTRACT

This research aims to analyze the synergy between monetary policy and fiscal policy in controlling inflation in Indonesia. Data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that year on year (y-on-y) inflation in February 2024 reached 275 percent with a Consumer Price Index (CPI) of 105.58. The approach used in this research is a qualitative descriptive method. Data was obtained from secondary data through the Central Statistics Agency. The research results show that fiscal policy, through income redistribution and fair budget allocation, can reduce economic disparities between regions and between individuals. Meanwhile, monetary policy which includes setting interest rates and controlling the money supply plays an important role in maintaining economic stability. This research suggests adaptive and responsive fiscal policy, as well as flexible monetary policy, as effective strategies in managing inflation and encouraging sustainable economic growth. Thus, it is hoped that this research can provide deeper insight into effective policy strategies to maintain price stability and the economic welfare of the Indonesian people.

Kata Kunci:

Inflasi, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi year on year (y-on-y) pada Februari 2024 mencapai 275 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105.58. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari data sekunder melalui Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, melalui redistribusi pendapatan dan alokasi anggaran yang adil, dapat mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah dan antarindividu. Sementara itu, kebijakan moneter yang mencakup pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian ini menyarankan kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif, serta kebijakan moneter yang fleksibel, sebagai strategi efektif dalam mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi kebijakan yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

PENDAHULUAN

Menurut data badan pusat statistik (BPS), pada februari 2024 terjadi infansi year on year (y-ony) sebesar 2,75 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,58. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 4,61 persen dengan IHK sebesar 106,70 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,81 persen dengan ihk sebesar 103,44. Sedangkan inflasi Kabupaten/Kota y-on-y tertinggi terjadi di kab. Minahasa Selatan sebesar 6,06 persen dengan ihk sebesar 107,25 dan terendah terjadi Kab. Belitung Timur sebesar 0,25 persen dengan ihk sebesar 104,48. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,57 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,95 persen; kelompok transportasi sebesar 1,40 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,68 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,55 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,38 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,09 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen.

Inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami kenaikan akibat pengaruh harga pangan global dan terganggunya rantai pasok akibat cuaca. Sedangkan kenaikan pada inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered price) dipengaruhi oleh naiknya harga tiket pesawat. Kenaikan yang sangat tinggi pada harga energi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi domestik akibat tekanan inflasi (Ependi, 2024). Meningkat atau menurunnya angka inflasi dapat dilihat sebagai pertanda dinamika ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang lebih dari sewajarnya bisa menjadi tanda kerugian bagi ekonomi negara (Yunita & Jamaludin, 2024). Indonesia telah mengalami fluktuasi yang tidak stabil dalam tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali dapat merugikan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, mengganggu perencanaan keuangan, dan menciptakan tekanan ekonomi yang besar. Perubahan dalam daya beli masyarakat tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada

kesejahteraan dan stabilitas sosial (Sekarsari et al., 2024). Inflasi pada dasarnya mencerminkan tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan dalam perekonomian nasional. Meskipun ada beberapa inflasi yang dianggap wajar dalam ekonomi, kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat merusak daya beli konsumen, mengacaukan alokasi sumber daya, dan membuat perencanaan ekonomi menjadi tidak pasti. Selain itu, inflasi juga bisa mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter suatu negara, yang perlu diatur dengan bijak untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang (Hafidz Meiditambua Saefulloh et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis sinergitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi secara komprehensif. Kebijakan fiskal berperan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui redistribusi pendapatan dan alokasi anggaran yang adil, pemerintah dapat mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah dan antar individu. Kebijakan moneter yang mencakup pengaturan suku bunga dan penguasaan jumlah uang beredar, juga memainkan peran penting dalam pengelolaan perekonomian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan dapat ditemukan strategi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, tulisan ini juga akan melihat bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat mencegah lonjakan harga yang tidak diinginkan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan ekonomi global seperti fluktuasi, harga komoditas, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan dampak perubahan iklim, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang adaptif dan responsif yang akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salahsatu bidang kebijakan ekonomi yang berperan sangat penting dalam mengatur dan mendukung stabilitas ekonomi negara. Jika uang yang beredar di negara tersebut berkurang secara tidak perlu, perekonomian negara tersebut akan mengalami resesi. Sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar di suatu negara melebihi permintaan, maka negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Ini berarti mengganggu stabilitas keuangan (Y. Sari, 2024) Dan Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana sistem mekanismenya mampu mengalokasikan sumber dana nya secara baik dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan (Jumiati & Al-Muhajirin Purwakarta, 2022).

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh

pemerintah melalui bank sentral untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengendalikan inflasi (Susilowati & Wahyuningdyah dalam Hatidja et al., 2024). Salah satu aspek utama yang perlu dipertimbangkan adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke tingkat inflasi. Bank Sentral, termasuk Bank Indonesia (BI) di Indonesia, memiliki peran utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah, yang tercermin dalam indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Berbagai mekanisme, seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan imbauan moral, digunakan dalam operasionalisasi kebijakan moneter. Tujuan dari mekanisme tersebut adalah untuk mempengaruhi sasaran moneter melalui pasar uang dan jalur transmisi moneter terhadap suku bunga kredit, harga aset, ekspektasi, dan faktor-faktor lainnya. (Ramadhani et al., 2024). Sedangkan menurut (Setiawan, 2018) Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah terciptanya stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (terjaganya laju inflasi), membaiknya pendapatan per kapita, serta tersedianya kesempatan kerja yang luas.

Nurhasanah & Nugroho (2024) memberikan contoh kebijakan moneter, seperti:

a) Politik Diskonto

Dalam upaya mengendalikan laju inflasi dan mempertahankan stabilitas ekonomi, bank sentral memiliki wewenang untuk melakukan penyesuaian suku bunga diskonto, yaitu suku bunga yang dikenakan kepada lembaga keuangan ketika meminjam dana dari bank sentral. Ketika bank sentral memutuskan untuk meningkatkan suku bunga diskonto, hal ini secara teoritis cenderung mengurangi likuiditas di pasar karena lembaga keuangan akan mengurangi pinjamannya dari bank sentral mengingat biaya yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menahan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan suku bunga diskonto bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan meminjam lebih banyak dana dari bank sentral, sehingga meningkatkan jumlah uang yang beredar dan dapat menstimulasi aktivitas ekonomi.

b) Politik Pasar Terbuka

Kebijakan ini menurut (Purba et al., 2022) merupakan salah satu instrumen yang strategis, di mana bank sentral berkecimpung langsung dalam pasar keuangan melalui aktivitas jual beli surat berharga. Proses ini dilakukan untuk mempengaruhi suplai uang yang beredar di masyarakat serta level suku bunga di perekonomian. Ketika bank sentral membeli surat berharga dari pasar, hal tersebut menciptakan uang baru yang memasuki sistem perbankan, meningkatkan jumlah likuiditas, dan

cenderung menurunkan suku bunga. Sebaliknya, penjualan surat berharga oleh bank sentral bertujuan untuk menyerap uang dari sistem perbankan, mengurangi likuiditas, dan cenderung meningkatkan suku bunga. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Fiskal

Dalam teori makro ekonomi kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Instrumen penting dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Pemerintah merancang porsi yang pas antara penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai kestabilan ekonomi. Diantara beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang lazim dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain (Triwahyuni, 2021):

- a) Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga;
- b) Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu;
- c) Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha tertentu.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas makro ekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter (Sinaga & Nasution, 2024). Selain itu kebijakan fiskal juga berperan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ekonomi adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Melalui redistribusi pendapatan dan alokasi anggaran yang adil, pemerintah dapat mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah dan antar individu (F. M. Sari et al., 2024).

Terdapat dua jenis kebijakan fiskal yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu kebijakan fiskal yang diadopsi dan diterapkan untuk mengatasi tingkat inflasi yang tinggi. Kondisi inflasi yang tinggi disebabkan karena jumlah uang beredar di masyarakat lebih besar dibandingkan kebutuhannya. Kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif dilaksanakan melalui langkah-langkah pengurangan pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga jumlah uang beredar yang berasal dari mengalirnya uang dari pemerintah melalui proyek-proyek ke masyarakat dapat dikurangi dan menaikkan tarif pajak, sehingga jumlah uang yang dipegang masyarakat berkurang karena naiknya pajak. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat ekonomi sedang mengalami kelesuan, dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Langkah yang

diambil adalah meningkatkan pengeluaran atau belanja pemerintah serta menurunkan tarif pajak (Aji, 2023).

Kebijakan Fiskal di Indonesia, diambil dari dana APBN (anggaran pendapatan biaya negara), kebijakan ini dinilai dapat memperbaiki inflasi dalam mendukung perekonomian. Inflasi bisa terkendali dengan baik jika kebijakan fiskal yang fungsinya untuk menekan pengeluaran dan penerimaan negara untuk menyesuaikan kenaikan barang dan daya beli uang. Kebijakan ini memegang peranan penting untuk menunjang kestabilan ekonomi suatu negara (Haniva et al., 2023). Secara spesifik, Keynes yakin pemerintah memotong pajak atau menaikkan pengeluarannya yang disebut kebijakan fiskal ekspansioner untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan. Sebaliknya, Keynes mengemukakan bahwa pemerintah hendaknya menaikkan pajak atau mengurangi pengeluarannya yang disebut kebijakan fiskal kontraksioner untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi (Agusmianata et al., 2017) .

Inflasi

Menurut Siregar dkk (2024) Inflasi adalah peningkatan umum dalam tingkat harga barang dan jasa. Berbagai faktor dapat menyebabkan inflasi, termasuk inflasi alami, kesalahan manusia, tekanan biaya, spiral inflasi, dan inflasi impor. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang umumnya diukur dengan kenaikan umum dan berkelanjutan dalam tingkat harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Ini dapat diartikan sebagai penurunan daya beli mata uang, yang menyebabkan uang menjadi kurang bernilai seiring berjalannya waktu (Maulana & Maulana, 2024).

Menurut Mulyani dalam Sari, (2024) Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap suatu barang tertentu. peristiwa ini menyebabkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, merusak output, meruntuhkan efisiensi dan investasi produktif, serta menimbulkan ketidakadilan sosial. Dampak inflasi tidak hanya merugikan konsumen dengan menurunkan daya beli, tetapi juga dapat memengaruhi produsen dengan mengurangi margin keuntungan dan kepastian harga untuk perencanaan dan investasi. Lebih jauh, inflasi tinggi dan tidak terkontrol berpotensi membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi ini menjadi perhatian utama sebab dapat memiliki dampak luas pada perekonomian.

Tingkat inflasi yang sangat tinggi dapat memperburuk distribusi pendapatan, meningkatkan tingkat kemiskinan, mengurangi tabungan domestik, menciptakan defisit neraca perdagangan, meningkatkan besaran utang luar negeri, dan menimbulkan ketidakstabilan politik. (Ramadhani et al., 2024). Selain itu, inflasi juga bisa mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter suatu negara, yang perlu diatur dengan bijak untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang (Hafidz Meiditambua Saefulloh et al., 2023). Oleh

karena itu, pengendalian inflasi menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan secara tidak langsung menjaga kesejahteraan rakyat (Ulhaq dalam Nurhasanah & Nugroho, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkap, mengklarifikasi, dan menggambarkan fenomena atau kejadian dalam masyarakat dengan cara yang mendalam dan komprehensif (Ependi, 2024). Metode dan pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan kajian kepustakaan tentang sinergitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi secara komprehensif. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan (Sugiyono dalam Hatidja et al., 2024)). Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder berupa jurnal dan artikel. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif untuk menemukan rumusan konseptual tentang sinergitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi secara komprehensif. Dengan metode ini, penulis diharapkan dapat mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel dan menghasilkan kesimpulan yang obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bank Sentral, termasuk Bank Indonesia (BI) di Indonesia, memiliki peran utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah, yang tercermin dalam indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Berbagai mekanisme, seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan imbauan moral, digunakan dalam operasionalisasi kebijakan moneter. Tujuan dari mekanisme tersebut adalah untuk mempengaruhi sasaran moneter melalui pasar uang dan jalur transmisi moneter terhadap suku bunga kredit, harga aset, ekspektasi, dan faktor-faktor lainnya (Ramadhani et al., 2024).

Tolak ukur stabilitas moneter yang dilihat dari inflasi mendorong Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan sebagai otoritas moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga, agar minat masyarakat untuk menabung tinggi, sehingga kondisi di sektor akan stabil dan tidak terjadi efek kenaikan harga yang tinggi. Kenaikan harga tinggi menyebabkan daya beli akan rendah dan tidak bergairahnya sektor riil sehingga perlu dilakukan stabilisasi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Pada saat bank sentral mengambil kebijakan menaikkan suku bunga, maka terjadi penurunan permintaan uang, kemudian pertumbuhan kredit konsumen menurun, biaya

investasi semakin tinggi dan tabungan menjadi instrumen yang lebih menarik sehingga permintaan agregat kembali turun. Pada saat yang sama, kebijakan moneter yang restriktif akan mengakibatkan turunnya inflasi dan membatasi terjadinya kontraksi defisit anggaran (Setiawan, 2018). Selain menjaga suku bunga, Bank Indonesia perlu menstabilkan dari sisi perubahan nilai tukar rupiah, agar tetap menjaga kestabilan harga-harga di dalam negeri dan faktor penarik bagi luar negeri. Memang ada kalanya nilai tukar rupiah yang rendah, dapat menarik dari sisi daya beli luar negeri dan memberikan dampak positif dalam Pembangunan (Jumiati & Al-Muhajirin Purwakarta, 2022). Untuk mengendalikan inflasi yang tinggi, Bank Indonesia atau BI dapat mengendalikannya dengan menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) untuk menekan dana yang beredar di masyarakat. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai surat kuasa utang jangka pendek dalam bentuk mata uang Rupiah dan juga merupakan salah satu alat operasi pasar terbuka. SBI dapat dimiliki oleh Bank dan pihak lain yang ditunjuk oleh BI untuk dialihkan. Selain itu pembelian SBI dapat dilakukan di pasar perdana dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder melalui mekanisme jual beli bersyarat dan perdagangan longgar. (Harahap et al., 2022).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja Negara baik itu belanja rutin maupun belanja Pembangunan. Pengeluaran pemerintah berperan dalam untuk mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat di penuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan Negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaan yang sebagian besar berasal dari pajak (Agusmianata et al., 2017).

Tinjauan terhadap kebijakan fiskal akan mengkaji langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Salah satu langkah kebijakan fiskal adalah pengaturan anggaran belanja negara. Pemerintah dapat mengatur pengeluaran negara untuk mengendalikan dampak inflasi. Misalnya, meninjau ulang anggaran belanja untuk mengurangi defisit anggaran sehingga menghindari pencetakan uang tambahan yang dapat mendorong inflasi. Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN, dan masalah – masalah APBN lainnya.

Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/pengangguran dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit,

pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri (cara yang kedua ini berarti ekonomi tidak lagi tertutup). Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi (Edi Irawan, 2023). Pemerintah dapat mengurangi belanja pemerintah atau menaikkan pajak. Ini akan mengurangi jumlah uang beredar di pasar. Selain itu, subsidi harga juga merupakan salah satu mekanisme kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat memberikan subsidi langsung kepada produsen atau konsumen untuk menekan kenaikan harga barang dan jasa tertentu yang dapat mempengaruhi inflasi. (Aji, 2023) mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir telah berhasil mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga melalui pengaturan belanja pemerintah dan penerimaan pajak. Kebijakan ini menunjukkan bahwa intervensi fiskal yang tepat dapat membantu menjaga kestabilan harga di pasar domestik.

Inflasi yang tinggi atau tidak terkendali cenderung memiliki dampak negatif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, dan menciptakan ketidakpastian bagi bisnis dan investor. Pemerintah dan bank sentral sering kali harus mengambil tindakan keras untuk mengendalikan inflasi dalam situasi seperti ini, yang dapat mencakup menaikkan suku bunga secara drastis atau menerapkan kebijakan fiskal yang ketat. Namun, tindakan semacam itu juga dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. (Lestari Situmorang et al., 2024). Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan (Sari, 2024).

Handoko dalam Sari dkk (2024) menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa kombinasi yang tepat antara kebijakan fiskal dan moneter dapat membantu mengatasi inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sinergi ini sangat penting dalam konteks ekonomi global

yang semakin terintegrasi. Pentingnya pemerintah dalam mengatur ekonomi juga mencerminkan dalam kebijakan moneter yang mengatasi inflasi. Berbagai faktor, seperti korupsi, pajak yang tinggi, dan pencetakan uang berlebihan, dapat menyebabkan inflasi. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang tepat, baik kebijakan fiskal maupun moneter, hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tentangan inflasi (Ramadhani et al., 2024).

Siregar dkk (2024) mengatakan bahwa kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran yang saling terkait dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, menggunakan instrumen seperti pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pengeluaran dan pendapatan negara, juga dapat memengaruhi tingkat inflasi melalui dampaknya terhadap permintaan agregat. Dalam konteks ekonomi global, kebijakan moneter dan fiskal harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global yang terus berubah. Faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas internasional, perubahan kondisi ekonomi global, dan gejolak nilai tukar mata uang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi di tingkat domestik. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal perlu diatur secara bijaksana untuk menghadapi tantangan yang kompleks ini. Kebijakan moneter, inflasi, dan kebijakan fiskal adalah tiga aspek penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Siklus ekonomi yang sering terjadi membutuhkan penanganan yang cermat dari pemerintah atau otoritas moneter melalui kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar mencapai stabilitas ekonomi makro yang diinginkan, termasuk stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi positif, dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Sementara itu, inflasi merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari segi penyebab maupun dampaknya.

Pembahasan

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal di Indonesia pada dasarnya berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong permintaan agregat. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia dapat dikatakan kurang efektif jika dilihat dari besaran pengganda fiskal yang dihasilkan. Kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia dapat mendorong kenaikan inflasi meskipun responnya sangat lemah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menggunakan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter.

- a) Pengurangan Belanja Pemerintah: Mengurangi pengeluaran pemerintah dapat membantu menurunkan permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat membantu mengendalikan

- inflasi. Pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Kadang-kadang pengurangan belanja tidak dilakukan secara efisien dan dapat mengganggu sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan.
- b) **Peningkatan Pajak:** Meningkatkan tarif pajak dapat mengurangi pendapatan disposable, sehingga mengurangi konsumsi dan permintaan agregat. Peningkatan pajak dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, memperburuk ketimpangan ekonomi.
 - c) **Subsidi Terarah:** Memberikan subsidi kepada sektor-sektor penting seperti pangan dan energi untuk menjaga harga barang-barang pokok tetap stabil.

Kebijakan Moneter

- a) **Kenaikan Suku Bunga:** Menaikkan suku bunga dapat mengurangi jumlah uang beredar dengan membuat pinjaman lebih mahal dan mendorong tabungan.
- b) **Penjualan Obligasi Pemerintah:** Menjual obligasi dapat menyerap likuiditas dari pasar, mengurangi jumlah uang beredar.
- c) **Penguatan Kebijakan Cadangan Wajib:** Meningkatkan rasio cadangan wajib bagi bank dapat membatasi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank.
- d) **Dampak pada Investasi:** Kenaikan suku bunga dapat mengurangi investasi, karena biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat mengurangi keuntungan investasi.
- e) **Pengaruh Terhadap Konsumen:** Biaya pinjaman yang lebih tinggi juga dapat mengurangi konsumsi rumah tangga, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- f) **Keterlambatan Efek:** Kebijakan moneter sering kali memiliki efek yang tertunda, sehingga mungkin tidak segera efektif dalam mengendalikan inflasi.

Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter: penting untuk memiliki koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil saling mendukung dan tidak bertentangan. Kebijakan Struktural mengimplementasikan reformasi struktural yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi jangka panjang, seperti investasi dalam infrastruktur dan pendidikan. Komunikasi yang jelas memberikan komunikasi yang jelas kepada publik mengenai tujuan dan langkah-langkah kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi.

Secara keseluruhan, pengendalian inflasi memerlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang, dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan yang diambil serta memastikan adanya koordinasi yang efektif antara kebijakan fiskal dan moneter. Dengan demikian pentingnya sinergitas antara kebijakan moneter dan fiskal

dalam menghadapi tantangan inflasi. Kenaikan harga energi global, misalnya, dapat memicu inflasi yang memerlukan respons moneter dan fiskal yang terkoordinasi. Pemerintah dan bank sentral perlu bekerja sama untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan dinamika ekonomi global dan domestik, seperti perubahan harga komoditas dan kebijakan perdagangan internasional. Kesimpulannya, sinergitas kebijakan moneter dan fiskal adalah kunci untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui pendekatan yang terintegrasi, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat dioptimalkan untuk mengatasi inflasi yang berkejang dan memitigasi dampak negatifnya terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat.

PENUTUP

Sinergitas antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan strategi penting dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang menunjukkan kenaikan umum dalam tingkat harga barang dan jasa, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan biaya produksi, peningkatan permintaan, atau fluktuasi harga komoditas global. Tingkat inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli masyarakat, mengganggu perencanaan keuangan, dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial.

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) memiliki peran utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter dengan tujuan menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin dalam inflasi dan nilai tukar. Instrumen kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, penyesuaian suku bunga diskonto, dan rasio cadangan wajib. Operasi pasar terbuka, misalnya, melibatkan penjualan dan pembelian surat berharga untuk mengatur likuiditas di pasar. Kebijakan suku bunga diskonto, yang menentukan biaya pinjaman bagi lembaga keuangan dari bank sentral, juga merupakan alat penting untuk mengendalikan inflasi.

Di sisi lain, kebijakan fiskal melibatkan penggunaan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Pemerintah menggunakan instrumen seperti pajak dan pengeluaran publik untuk mengatur permintaan agregat. Kebijakan fiskal ekspansif, yang meliputi peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak, digunakan untuk merangsang ekonomi dalam kondisi resesi. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif diterapkan untuk mengurangi inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Kebijakan fiskal juga berperan dalam redistribusi pendapatan dan pengurangan

ketimpangan ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang efektif diperlukan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Inflasi di Indonesia, yang dipicu oleh faktor-faktor seperti kenaikan harga pangan global dan gangguan rantai pasok, memerlukan respons kebijakan yang komprehensif. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mengendalikan jumlah uang beredar dan menstabilkan harga, sementara kebijakan fiskal dapat mendukung stabilitas dengan mengatur pengeluaran dan penerimaan negara secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmianata, N., Militina, T., & Lestari, D. (2017). Pengaruh jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga serta pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di Indonesia. *FORUM EKONOMI*, 19(2), 2017.
- Aji. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.
- Edi Irawan. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 01–08. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898>.
- Ependi. (2024). Implementasi Kebijakan Moneter Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi dan Kurs Rupiah Ependi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(4).
- Feronika Br Simanungkalit, E. (2020). PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Vol. 13, Issue 3).
- Hafidz Meiditambua Saefulloh, M., Rizah Fahlevi, M., & Alfa Centauri, S. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3.
- Haniva, S., Awalunnisa, Y., Putri, T. D., & Sakhi, R. F. (2023). ANALISIS PENGARUH INFLASI TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DI PROVINSI BANTEN. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 1 No.1, 95–102.
- Harahap, F. R., Tambunan, K., & Jannah, N. (2022). Peranan Kebijakan Moneter Konvensional dan Islam terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No.2, 2929–2939.
- Hatidja, S., Alam, R., Nurlaela, Syarifuddin, A., & Akal, A. T. U. (2024). EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MONETER DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENGENDALIKAN INFLASI. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7 No. 2, 6117–6123.
- Jumiati, E., & Al-Muhajirin Purwakarta, S. (2022). Kebijakan Moneter Sebagai Pengendali Inflasi Dan Nilai Tukar (Peran Bank Sentral). *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Lestari Situmorang, P., Kamizaun Mopah Lama, J., Merauke, K., & Selatan, P. (2024). Analisis

- Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Riris Lawitta Maulina Siahaan Universitas Musamus. *JIEAP*), 1(2), 245–255. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.158>.
- Maulana, A. W., & Maulana, I. S. (2024). Dinamika Inflasi Di Indonesia Terhadap Daya Beli Masyarakat Pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 20–29. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.437>.
- Nurhasanah, H., & Nugroho, F. A. (2024). Menghadapi Inflasi : Strateg Pengendalian dan Dampak Terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. *PTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4 No.2, 56–72.
- Pujadi, A. (2022). INFLASI : TEORI DAN KEBIJAKAN. *Jurnal Manajemen Diversitas*, 2, No.2.
- Ramadhani, N., Sthela Oktaviany, A., & Arkaan Satria Utama, M. (2024). PERAN PEMERINTAH MENSTABILKAN INFLASI DENGAN KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JURNAL SOSIAL DAN SAINS, VOL.4 NO.2*. <http://sosains.greenvest.co.id>.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. In *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* (Vol. 1, Issue 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae>.
- Sari, Y. (2024). Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 621. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11938>.
- Sekarsari, D., Amaliah, F., Zahra, A., Ayuningtyas, R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Inflasi dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi di Indonesia. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Issue 3). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>.
- Setiawan, H. (2018). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI DI INDONESIA DENGAN MODEL STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSION (SVAR). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2). <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>.
- Sinaga, M. S., & Nasution, Y. S. J. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASI. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2 No.1, 667–672.
- Siregar, P. A., Rangkuti, I. Y., Inayah, F. D., Ardini, N., & Naya, A. (2024). SEBUAH PENELITIAN KEPUSTAKAAN: PENGENDALIAN INFLASI, MONETER DAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MAKRO ISLAM. In *Jurnal Multidisiplin Inovatif* (Vol. 8, Issue 3).
- Triwahyuni. (2021). PENGENDALIAN INFLASI, MONETER, DAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MAKRO ISLAM. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6 No 2, 199–210.
- Yunita, R., & Jamaludin. (2024). PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 7 Nomor 1, 887–902.